

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM dikenal sebagai sektor usaha yang mandiri, yang kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada perusahaan besar, sehingga memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengelola sumber daya dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Keberadaan UMKM terbukti menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya tahan perekonomian secara nasional. Kemajuan ekonomi nasional serta ketahanan finansial masyarakat yang berkesinambungan tidak lepas dari peran penting UMKM. (Aulia, 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (2025) yang menyatakan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun. Selain itu, sektor ini juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM berperan penting sebagai tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di masa-masa ketidakpastian ekonomi global.

UMKM memiliki tujuan utama menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Melalui pengembangan usaha pada skala kecil dan menengah, UMKM mampu mendorong terbentuknya nilai tambah ekonomi yang kompetitif dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan UMKM juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat karena perannya yang signifikan dalam membuka peluang kerja baru, sehingga menjadi solusi strategis dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai sektor (Nayla Munawara & Rohmah, 2025).

Di tengah kompleksitas permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, keberadaan UMKM menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional terbilang krusial, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru serta memperluas kesempatan berwirausaha bagi masyarakat luas (Aulia, 2024). Kendati memiliki peran strategis, sektor ini masih dibayangi oleh berbagai hambatan operasional. Berdasarkan data dari *UMKM Support Report 2022*, beberapa kendala utama yang kerap dihadapi pelaku usaha meliputi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, penetrasi pasar, pemenuhan bahan baku, hingga rendahnya implementasi teknologi digital (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Laporan *MSME Empowerment Report (2022)* menekankan bahwa lemahnya pengelolaan keuangan dan kurangnya adopsi teknologi digital merupakan dua dari lima tantangan utama yang paling sering dialami UMKM di Indonesia. Penguasaan manajemen arus kas di kalangan pemangku kepentingan UKM cenderung terhambat akibat masih rendahnya pemahaman atau literasi mereka di bidang keuangan, menyusun laporan keuangan, dan membuat keputusan bisnis, sementara rendahnya pemanfaatan teknologi keuangan membatasi efisiensi operasional dan akses terhadap layanan keuangan modern.

Hal ini diperburuk dengan dominannya pencatatan transaksi secara manual yang minim dokumentasi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak lengkap. Padahal, pembukuan yang rapi dan terstruktur sangat penting untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja UMKM dalam pengambilan suatu keputusan (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Secara konseptual, kinerja keuangan merujuk pada representasi tingkat keberhasilan pelaku usaha atau individu dalam menata operasional dan sumber daya finansial mereka. Guna mencapai performa yang optimal, diperlukan penerapan strategi yang fokus dan tepat sasaran demi memenuhi sasaran organisasi. Lebih jauh lagi, aspek ini berfungsi sebagai instrumen penilaian untuk memverifikasi apakah tata kelola keuangan suatu bisnis telah mematuhi standar dan pedoman manajemen yang relevan (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Kinerja keuangan disetiap bisnis atau perusahaan berbeda-beda, tergantung sistem yang dijalankan oleh suatu bisnis atau perusahaan tersebut (Jumiari & Julianto, 2020).

Rasio kredit bermasalah *Non-Performing Loan* (NPL) UMKM setiap tahunnya memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antar kabupaten. Beberapa wilayah seperti Buleleng, Jembrana, Denpasar dan Karangasem tercatat memiliki tingkat NPL yang tergolong tinggi. Kondisi ini tentunya mencerminkan ketimpangan dalam kualitas kredit UMKM antar daerah.

Tabel 1. 1
Perkembangan Non- Performing Loan (NPL) Kredit UMKM Provinsi Bali
Triwulan IV Tahun 2024

Kabupaten/Kota	2024
	Triwulan IV
Kab. Buleleng	2,58%
Kab. Jembrana	2,19%
Kota Denpasar	1,96%
Kab. Karangasem	1,61%
Kab. Tabanan	1,19%
Kab. Klungkung	1,12%
Kab. Badung	0,80%
Kab. Gianyar	0,60%
Kab. Bangli	0,30%

Sumber: (Bank Indonesia, data diolah peneliti (2025))

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Kabupaten Buleleng Pada Triwulan IV tahun 2024, menempati posisi pertama dengan rasio NPL tertinggi di Provinsi Bali sebesar (2,58%). Selain itu, Kabupaten Buleleng juga memiliki rekam jejak sebagai salah satu wilayah dengan tingkat NPL tertinggi pada periode sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2 Kondisi ini memperlihatkan perkembangan kredit UMKM di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan kualitas, sehingga risiko kredit tetap perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 1. 2

Perkembangan Non-Performing Loan (NPL) Kredit UMKM Provinsi Bali
Triwulan I-IV Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	NPL (%)											
	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kota Denpasar	3,57%	3,86%	3,59%	2,88%	3,25%	3,01%	2,73%	2,49%	2,18%	2,62%	2,68%	1,96%
Kab. Badung	5,85%	6,02%	3,10%	2,51%	1,59%	2,46%	1,80%	1,65%	1,42%	1,16%	1,00%	0,80%
Kab. Gianyar	1,26%	1,04%	0,85%	0,65%	0,69%	1,77%	1,80%	0,87%	0,81%	0,83%	0,80%	0,60%
Kab. Buleleng	4,49%	4,76%	4,48%	4,04%	3,73%	3,01%	3,03%	2,99%	2,77%	2,95%	3,12%	2,58%
Kab. Tabanan	1,64%	2,04%	1,96%	1,70%	1,89%	1,43%	1,87%	1,88%	1,85%	1,80%	1,53%	1,19%
Kab. Karangasem	1,75%	2,41%	4,47%	3,75%	4,12%	3,91%	3,58%	3,07%	2,82%	3,12%	2,67%	1,61%
Kab. Jembrana	4,81%	4,70%	2,01%	1,59%	2,16%	1,16%	0,93%	0,65%	1,87%	2,95%	2,82%	2,19%
Kab. Bangli	1,13%	1,09%	1,32%	1,12%	1,67%	1,15%	1,23%	0,47%	0,65%	0,52%	0,62%	0,30%
Kab. Klungkung	4,17%	4,49%	4,32%	4,18%	4,33%	3,95%	4,15%	0,97%	1,14%	2,67%	1,22%	1,12%

Sumber: Bank Indonesia, data diolah peneliti (2025)

Adapun karakteristik ekonomi UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari distribusi unit usaha berdasarkan sektor dominan yang dijalankan oleh pelaku usaha, hal tersebut bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 1. 3

Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Jumlah UMKM	Persentase (%)
Perdagangan	18.129	46%
Perindustrian	4.964	13%
Pertanian Non Pertanian	3.091	8%
Aneka Jasa	13.182	33%
TOTAL	39.366	100%

Sumber: DiskominfoSanti Kab. Buleleng, data diolah peneliti (2025)

Dari total 39.366 UMKM yang tercatat, sebanyak 18.129 unit (sekitar 46%) bergerak di sektor perdagangan. Dominasi sektor perdagangan ini mencerminkan peran sentralnya dalam perekonomian lokal, namun juga menunjukkan potensi kerentanan yang lebih tinggi terhadap permasalahan

finansial, salah satunya adalah risiko kredit bermasalah. Di sisi lain, data nasional yang ada, juga memperlihatkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor dengan tingkat NPL tertinggi, yaitu sebesar 2,03% pada tahun 2025 (Bank Indonesia, 2025). Fenomena inilah yang melatarbelakangi studi ini untuk berfokus pada UMKM sektor perdagangan di Provinsi Buleleng. Analisis terhadap kondisi tersebut menjadi sangat krusial mengingat dominasi sektor perdagangan di Buleleng ternyata belum linier dengan kualitas kinerja keuangan para pelaku usahanya yang dinilai masih rendah.

Penurunan Kinerja Keuangan berdampak langsung pada kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban kredit, sehingga berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) (Naomi & Sinarwati, 2023). Penurunan pendapatan secara langsung memperbesar tantangan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pinjamannya, yang pada gilirannya dapat menaikkan tingkat kredit bermasalah (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Kondisi di Provinsi Buleleng menjadi representasi nyata dari masalah ini; dengan rasio kredit macet sebesar 2,58% (tertinggi di Bali), terlihat bahwa stabilitas keuangan dan kecukupan modal UMKM di daerah tersebut masih menjadi persoalan serius.

Keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dianalisis dari berbagai dimensi, salah satunya melalui kacamata teori berbasis sumber daya. Pandangan ini awalnya dipelopori oleh Wernerfelt (1984) guna menguraikan peran krusial aset internal dalam membangun keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Dalam perkembangannya, Barney (1991) memperluas teori ini dengan memperkenalkan kriteria VRIN yaitu bernilai, langka, sulit ditiru, dan

tidak memiliki substitusi sebagai indikator utama sumber daya yang kompetitif. Teori ini menggarisbawahi bahwa efektivitas tata kelola, pengendalian, dan alokasi atas sumber daya strategis meliputi aset berwujud dan tidak berwujud berdampak langsung pada peningkatan daya saing serta pencapaian kinerja finansial perusahaan yang maksimal (Yasrawan et al., 2023). Kemampuan sebuah perusahaan untuk mempertahankan kinerja finansial yang berkelanjutan dan mengungguli para kompetitornya sangat bergantung pada mutu sumber daya internal yang dikuasainya, sebagaimana yang diasumsikan dalam konsep ini. Sumber daya dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan dikendalikan oleh pelaku usaha, seperti aset, keterampilan individu, penguasaan teknologi, sistem kerja, serta informasi yang mendukung pelaksanaan strategi usaha guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Menurut (Barney, 1991), Klasifikasi sumber daya strategis ini terbagi menjadi tiga dimensi utama. Pertama, modal fisik, yang merepresentasikan aset berwujud seperti adopsi teknologi, fasilitas operasional, peralatan kerja, lokasi usaha, hingga aksesibilitas bahan baku. Kedua, modal manusia, yang mencakup akumulasi pengetahuan, kompetensi teknis, serta kapabilitas intelektual dari seluruh tenaga kerja. Ketiga, modal organisasi, yang mencakup kepatuhan sistem pelaporan keuangan, tata kelola internal, serta efektivitas struktur organisasi dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Sumber daya yang dikuasai oleh pelaku usaha di sektor UMKM pada dasarnya terbagi ke dalam tiga pilar modal utama. Pilar-pilar tersebut meliputi modal manusia yang diwujudkan melalui tingkat kompetensi keuangan, modal fisik yang

tercermin dari integrasi teknologi keuangan, serta modal organisasi yang ditunjukkan oleh kecakapan dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid.

Penelitian ini mengadopsi teori berbasis sumber daya sebagai kerangka analisis makro. Pendekatan teoritis ini sejalan dengan beberapa literatur terdahulu. Candraningsih dkk. (2023) bersama Fitrianita dan Sinarwati (2024) mengonfirmasi bahwa dimensi literasi keuangan tergolong sebagai aset internal yang memengaruhi kinerja keuangan berdasarkan teori tersebut. Selain itu, aplikasi teori berbasis sumber daya juga ditemukan pada studi Fitrianita dan Sinarwati (2024) terkait variabel teknologi keuangan, serta penelitian Aulia (2024) yang berfokus pada urgensi kapabilitas penyusunan laporan keuangan.

Secara konseptual, indeks literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan mengelola dan mengerti tata kelola uang dengan bijak demi kelangsungan bisnis dan kesejahteraan bersama (Daud et al., 2023). Di sektor UMKM, tingginya tingkat literasi keuangan berkorelasi positif terhadap penguatan performa finansial (Sumantri & Indraswari, 2024). Perkembangan pemahaman finansial ini terlihat pada rilis data *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Menurut laporan (OJK, 2025) Provinsi Bali berhasil mencatatkan kenaikan tingkat literasi keuangan yang cukup progresif dalam kurun waktu dua tahun, yakni dari angka 57,66% (tahun 2022) merangkak naik hingga menyentuh 65,08% pada tahun 2024. Kinerja keuangan sektor UMKM rentan terdampak oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Bali, meskipun di sisi lain angka inklusi keuangan wilayah tersebut sudah berada di posisi 73,55%. Minimnya pemahaman ini menjadi hambatan serius bagi para wirausahawan dalam menguasai aspek-aspek vital pengelolaan bisnis, seperti

formulasi rencana keuangan, pengendalian arus kas, hingga efisiensi tata kelola kredit usaha (Ubaidillah & Atmini, 2022).

Indikasi rendahnya tingkat literasi keuangan di Provinsi Buleleng dibuktikan secara empiris melalui studi kuesioner awal pada 30 pelaku UMKM. Hasil survei menunjukkan persentase rata-rata pemahaman responden terhadap empat pilar keuangan hanya sebesar 43%, dengan rincian: pengetahuan manajemen umum (56,6%), pinjaman dan tabungan (46,67%), investasi (36,6%), serta asuransi (30%). Temuan ini selaras dengan potret riil di lapangan, di mana sebagian besar UMKM belum memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang sehat. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku pelaku usaha yang belum memisahkan aliran kas pribadi dengan kas operasional perusahaan. Sebaliknya, pendapatan entitas bisnis justru dihabiskan untuk konsumsi harian keluarga alih-alih ditabung atau diinvestasikan kembali. Rendahnya literasi keuangan yang berujung pada inefisiensi pengelolaan laba ini diprediksi akan memberikan konsekuensi negatif terhadap kinerja keuangan jangka panjang UMKM tersebut.

Relevansi literasi keuangan dalam memengaruhi performa finansial masih menyisakan inkonsistensi temuan pada literatur terdahulu. Di satu sisi, korelasi positif dan signifikan berhasil dibuktikan oleh sejumlah periset di berbagai wilayah Indonesia, seperti Erin dkk. (2025) di Medan, Fitrianita dan Sinarwati (2024) di Karangasem, serta Aulia (2024) di Jakarta. Hasil senada juga dikonfirmasi oleh Candraningsih dkk. (2023) di Buleleng, Daud dkk. (2023) di Poso, serta Yuniarti dkk. (2023) di Bengkulu. Sebaliknya, studi empiris yang dilakukan Pradipta (2022) di Kabupaten Sukoharjo justru menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak memberikan kontribusi menguntungkan bagi kinerja

keuangan usaha. Ketidakselarasan hasil ini disinyalir berakar dari variasi sektor ekonomi yang menjadi objek pengamatan, mengingat tiap lini bisnis memiliki karakteristik operasional dan profil risiko yang unik. Dinamika hubungan yang belum konvergen ini, ditambah dengan kompleksitas problem di lapangan, menjadi justifikasi kuat atas urgensi pelaksanaan studi lanjutan untuk menguji kembali pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UKM.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 menjelaskan teknologi keuangan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi di sektor finansial yang mengintroduksi barang, jasa, hingga model bisnis baru dengan dampak signifikan pada ketahanan moneter serta efisiensi sistem pembayaran. Dalam perspektif teori berbasis sumber daya, keberadaan teknologi finansial ini diposisikan sebagai salah satu aset internal krusial yang turut menentukan tingkat keberhasilan keuangan yang dicapai oleh pelaku UKM (Arifuddin et al., 2023). Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen, UMKM dituntut untuk melakukan transformasi digital agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar (Ustadus Sholihin, 2024). Keberhasilan UMKM dalam proses adaptasi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu mengelola pengetahuan dan teknologi secara efektif, karena kedua hal tersebut menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan usaha dan keunggulan kompetitif di tengah dinamika bisnis saat ini (Purnami et al., 2022). Laporan *MSME Empowerment Report 2022* mengungkapkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pemanfaatan teknologi keuangan, seperti keterbatasan akses terhadap jaringan internet, kurangnya perangkat yang memadai seperti ponsel pintar dan

laptop, serta rendahnya keterampilan dan literasi digital, khususnya di kalangan pemilik dan karyawan UMKM di wilayah pedesaan (Mawarsari, 2023). Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan teknologi keuangan menjadi kurang optimal. Perkembangannya diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha secara inklusif. Penggunaan dompet digital mampu menyederhanakan proses pembayaran dalam aktivitas UMKM, sekaligus mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan untuk pekerjaan manual (Fitrianita & Sinarwati, 2024).

Rendahnya pemahaman masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng mengenai utilitas QRIS menuntut adanya perluasan program edukasi secara masif, sebagaimana yang ditekankan oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra. Urgensi ini muncul karena integrasi ekosistem digital yang kian krusial ternyata belum diadopsi secara inklusif oleh pelaku UMKM setempat. Di lapangan, kendala nyata yang ditemukan berkisar pada keterbatasan pengalaman para pelaku usaha dalam menggunakan platform pembayaran digital, serta kendala struktural berupa belum dimilikinya perangkat gawai (*smartphone*) untuk mendukung operasional bisnis berbasis digital (Anwar, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Buleleng belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi keuangan secara maksimal dalam kegiatan usahanya. Kualitas pelaporan keuangan yang tergolong masih rendah pada sebagian besar pelaku usaha dipicu oleh pola transaksi dan mekanisme pencatatan yang sejauh ini masih diproses secara manual tanpa sistem pembukuan yang memadai. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital dan keterbatasan dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng,

yang berpotensi menghambat efisiensi operasional dan perkembangan usaha mereka ke arah yang lebih modern dan kompetitif.

Inkonsistensi hasil riset masih mewarnai literatur terdahulu yang menguji bagaimana implementasi teknologi finansial mampu berdampak pada performa keuangan di sektor UKM. Penelitian Erin et al. (2025) di Kota Medan menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* seperti aplikasi pembayaran digital memberikan dampak positif dalam mempercepat transaksi dan meningkatkan kinerja pelaku UMKM. Sejauh ini, pengaruh adopsi teknologi keuangan terhadap kinerja finansial UKM masih memicu perdebatan di kalangan peneliti. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fitrianita & Sinarwati (2024) di Kabupaten Karangasem, Reta & Indriastuti (2024) di Kabupaten Sukoharjo, serta Candraningsih dkk. (2023) di Kabupaten Buleleng, membuktikan bahwa teknologi keuangan membawa dampak menguntungkan pada efisiensi operasional dan profitabilitas bisnis. Kendati demikian, hasil kontradiktif diajukan oleh Yuniarti dkk. (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Bengkulu yang menyatakan tidak adanya efek riil dari integrasi teknologi tersebut. Kesenjangan konklusi ini mengindikasikan bahwa dampak teknologi finansial bersifat kontekstual bergantung pada tingkat kecakapan digital SDM, faktor demografis, dan kemajuan ekosistem digital setempat. Atas dasar ketidakpastian teoritis tersebut, pengujian ulang mengenai pengaruh variabel ini masih sangat relevan. Di sisi lain, potret keberhasilan tata kelola UKM juga tidak lepas dari dimensi krusial lainnya, yaitu keahlian menyusun laporan keuangan.

Sebagai alat komunikasi bisnis yang merefleksikan tren perkembangan atau kemunduran perusahaan, laporan keuangan menjadi prasyarat mutlak bagi

pengembangan usaha yang sukses. Dokumen finansial ini membekali pelaku UKM dengan basis data yang kuat untuk mengesekusi keputusan strategis secara cepat dan tepat waktu. Di samping itu, penyajian laporan keuangan juga merepresentasikan wujud tanggung jawab manajerial yang paling mendasar, khususnya dalam mengukur capaian profitabilitas maupun risiko kerugian yang dihadapi bisnis (Oktarina et al., 2024). Keterbatasan pemilik UMKM dalam mengukur dan merefleksikan keberhasilan usahanya secara riil berakar dari sistem pembukuan yang belum akuntabel. Transaksi keuangan di lapangan sebagian besar hanya mencakup pencatatan kas masuk dan keluar, arus barang, serta posisi kewajiban dan hak keuangan jangka pendek. Ketidaksesuaian mekanisme ini dengan prinsip dasar akuntansi membuat entitas usaha tersebut gagal menghasilkan laporan keuangan yang terstandardisasi untuk mendukung keberlanjutan bisnis (Winarso & Kurniawati, 2022). Kecakapan memproduksi laporan keuangan ini pada hakikatnya merupakan wujud dari kemampuan intelektual, yang menjadi cerminan dari kualitas modal manusia di dalam organisasi (Kamilan & Nurcholisah, 2022).

Berdasarkan publikasi data Bank Indonesia dan laporan perbankan daerah, Kabupaten Buleleng menunjukkan tren NPL yang cukup mengkhawatirkan di Provinsi Bali dengan angka mencapai 2,58%. Lonjakan rasio kredit bermasalah ini merefleksikan ketidakmampuan pelaku usaha dalam menata perputaran kas operasional serta memenuhi kewajiban utang mereka. Kondisi ini mempertegas bahwa tanpa adanya basis pelaporan keuangan yang akuntabel, risiko gagal bayar pinjaman pada sektor usaha kecil akan semakin meningkat. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan kegiatan usahanya

secara manual tanpa pencatatan transaksi yang rapi dan terstruktur, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan sulit digunakan untuk memantau kondisi usaha. Akibatnya, pelaku UMKM sering kali tidak mengetahui secara pasti posisi keuangan dan kemampuan membayar utang usahanya.

Potret rendahnya keahlian pembukuan pada UMKM di Kabupaten Buleleng tecermin dari temuan survei awal yang melibatkan 30 pelaku usaha. Rata-rata persentase pemenuhan enam indikator utama pelaporan keuangan responden hanya sebesar 43%. Jika dibedah, proporsi kemampuan mencatat transaksi serta menyusun laporan sesuai SAK EMKM menduduki angka 43,3%, diikuti oleh kemampuan klasifikasi akun dan pemanfaatan data finansial sebesar 40%. Tantangan terbesar terlihat pada kecakapan menyusun laporan laba rugi (36,6%) serta neraca perusahaan (33,3%). Serangkaian data kuantitatif dari studi pendahuluan ini memperjelas adanya urgensi peningkatan kapasitas pelaporan keuangan yang komprehensif bagi para pemilik usaha lokal.

Penelitian terkait kemampuan menyusun laporan keuangan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hidayatulloh. (2020) dan Aulia. (2024) Kinerja bisnis UMKM terbukti tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan atau menyusun laporan finansial. Di sisi lain penelitian oleh Kamilan & Nurcholisah (2022) di Kabupaten Tasikmalaya justru membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait kemampuan menyusun laporan keuangan UMKM salah satunya disebabkan oleh tingkat pemahaman akuntansi pelaku UMKM yang berbeda. Efektivitas pelaporan keuangan dalam

memengaruhi kinerja bisnis sangat bergantung pada berbagai faktor dinamis, sehingga hasilnya sering kali bervariasi. Berangkat dari adanya kontradiksi pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, studi mendalam mengenai korelasi antara kecakapan pelaporan keuangan dan keberhasilan finansial UKM menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

Penelitian ini melakukan pengembangan atas studi yang sebelumnya dilakukan oleh Erin dkk. (2025) mengenai dampak *fintech* dan literasi keuangan terhadap performa finansial UKM di Medan. Perbedaan mendasar terletak pada perluasan model analisis yang kini menyertakan variabel kapasitas pelaporan keuangan. Sisi inovatif dari riset ini ditunjukkan melalui konstruksi model konseptual baru yang mengintegrasikan tiga pilar modal utama berdasarkan perspektif *Resource-Based Theory* (RBT), yaitu *human capital* (literasi keuangan), *physical capital* (teknologi keuangan), dan *organizational capital* (kemampuan menyusun laporan keuangan). Sinergi antara modal fisik, modal manusia, dan modal organisasi menghadirkan pendekatan analitis baru dalam memetakan determinan internal kinerja keuangan UMKM. Keberadaan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian juga memberikan dinamika ekonomi lokal yang unik apabila dibandingkan dengan wilayah lain seperti Medan. Dengan demikian, temuan dalam riset ini diyakini mampu memperluas wawasan empiris sekaligus memperkuat landasan teoretis pengembangan sektor UMKM secara regional. Berdasarkan argumentasi tersebut, judul yang ditetapkan dalam penelitian ini **“Pengaruh Literasi Keuangan, Teknologi Keuangan, dan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah dipaparkan, beberapa poin utama identifikasi masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Lonjakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) UMKM di Kabupaten Buleleng yang menyentuh angka 2,58% pada triwulan akhir 2024 (tertinggi di Provinsi Bali), yang= mencerminkan besarnya hambatan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
2. Rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan survei awal terhadap 30 responden, di mana pemahaman terhadap dasar manajemen keuangan (17 orang), instrumen perbankan (14 orang), asuransi (9 orang), dan investasi (11 orang) masih sangat terbatas.
3. Ketimpangan pemanfaatan teknologi finansial di kalangan pelaku UMKM lokal, yang menegaskan urgensi percepatan transformasi digital sebagaimana disuarakan oleh I Nyoman Sutjidra (Anwar, 2025).
4. Lemahnya kompetensi penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi (SAK EMKM). Hasil prasurvei terhadap 30 UMKM membuktikan minimnya kebiasaan pencatatan harian (13 responden), pengelompokan akun (12 responden), penyusunan laporan laba rugi (11 responden), pembuatan neraca (10 responden), serta pemanfaatan informasi akuntansi untuk evaluasi bisnis (12 responden)

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Guna mencegah perluasan pembahasan yang tidak relevan dengan topik utama, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Kajian ini hanya berfokus pada sektor perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di Kabupaten Buleleng.
2. Ruang lingkup operasional variabel dibatasi pada kinerja keuangan sebagai variabel terikat, serta literasi keuangan, *financial technology*, dan kompetensi pelaporan keuangan sebagai variabel bebas.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam studi ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh teknologi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan, teknologi keuangan, dan kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan bukti empiris terkait pengaruh literasi keuangan pada kinerja keuangan pelaku UMKM sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Memperoleh kepastian empiris mengenai dampak implementasi teknologi keuangan terhadap performa keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.
3. Mengonfirmasi secara empiris keterkaitan antara kecakapan menyusun laporan keuangan dengan pencapaian kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.
4. Membuktikan pengaruh kolektif (simultan) dari literasi keuangan, teknologi keuangan, dan kompetensi pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Temuan dalam studi ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata, baik secara konseptual maupun aplikatif. Adapun kegunaan dari aspek teoretis dijabarkan di bawah ini:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini dirancang untuk berfungsi sebagai referensi akademik dan dasar empiris bagi pengembangan riset masa depan, khususnya yang mendalami domain literasi keuangan, teknologi digital finansial, serta kemampuan menghasilkan laporan keuangan pada sektor UKM.
 - b. Karya ilmiah ini diharapkan mampu memperkaya khazanah informasi bagi mahasiswa yang ingin mendalami dinamika pengaruh faktor

literasi, *fintech*, dan kapasitas akuntansi terhadap keberhasilan finansial UKM di bidang perdagangan Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Riset ini diarahkan untuk memberikan wawasan luas terkait pengaruh integrasi finansial digital, kecerdasan literasi keuangan, dan kemampuan menghasilkan laporan keuangan terhadap pencapaian kinerja bisnis sektor UMKM perdagangan. Hasil ini juga dapat digunakan bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja UMKM secara berkelanjutan.

b. Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng

Hasil riset ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana integrasi antara kecerdasan finansial, pemanfaatan *fintech*, dan kemampuan menghasilkan laporan keuangan dapat memicu peningkatan kinerja bisnis, sekaligus berfungsi sebagai instrumen krusial dalam pengambilan keputusan strategis.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan dari studi ini berpotensi menjadi arah acuan bagi penelitian lanjutan di masa depan, serta menyajikan pemikiran atau wawasan baru yang memperkaya domain akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM di daerah.